

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2026

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Mentok 33351
Telepon/Fax. (0716) 7323033, Web. bp2rd.bangkabaratkab.go.id, email : bp2rd.bangkabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 188.4/ 06 /SK/BP2RD/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4, Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
12. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. mengumpulkan data dan informasi serta menelaah aturan terkait Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 sesuai tahapan dan tata cara Penyusunan Renja;
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 6 Desember 2024

KEPALA



MIWANI, S.E

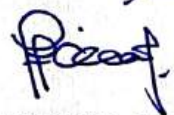
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor : 188.4/ 06 /SK/BP2RD/2024
Tanggal : 6 Desember 2024
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wakil Ketua
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Sekretaris
7.	Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Anggota
8.	Kasubbid Pendataan Pajak	Anggota
9.	Kasubbid Penilaian dan Penetapan Pajak	Anggota
10.	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah	Anggota
11.	Kasubbid Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Anggota
12.	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi	Anggota
13.	Kasubbid Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Anggota

 Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 6 Desember 2024

KEPALA



MIWANI, S.E

KATA PENGANTAR

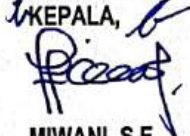
Puji syukur tak henti-hentinya kepada Allah SWT karena berkat bimbingan-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini wajib dimiliki oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Rencana Kerja awal sebagai permulaan maupun penyempurnaannya. Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang paling berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah. Adapun Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan (Tahun 2026).

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 terdiri dari program rutin maupun program strategis disertai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021 - 2026

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai acuan dimasa yang akan datang

Mentok, 6 Desember 2024
KEPALA,

MIWANI, S.E
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 198008242006042026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOTK dan Kewenangan Perangkat Daerah	5
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Semester I	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	23
2.4 Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal (RENJA)	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
3.4 Strategi dan Kebijakan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Capaian Realisasi Program Kegiatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Semester I)	16
Tabel 2.1.2	Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Semester I Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	16
Tabel 2.1.3.	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 Per 30 Juni 2024	19
Tabel 2.1.4.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 Per 30 Juni 2024	19
Tabel 2.1.5	Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 Semester I Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	20
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023	22
Tabel 2.3.1	Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	25
Tabel 2.4.1	Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026	29
Tabel 3.2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	39
Tabel 3.2.2	Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026	40
Tabel 4.1	Rincian Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Refokusing Anggaran TA. 2026	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini Pagu Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 terkait proyeksi kemampuan penganggaran untuk perencanaan pembangunan di Tahun 2026 serta memperhatikan realisasi anggaran per Kegiatan tahun 2024 serta Anggaran Tahun 2024 Semester 1, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ini menyampaikan Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan.

Adapun fungsi utama dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai turunan dari Rencana Strategis yang telah disusun dan dijadikan Peraturan Bupati sebelumnya yang mana Renja yang hendak dikelola ini merupakan Rancangan Awal tahun 2026 penganggaran yang nantinya akan menjadi Renja 2026 yang akan dilaksanakan selama tahun 2026

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat 2 (dua) Program dan menjadi 8 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan ini yang akan berproses menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) induk OPD Tahun Anggaran 2026 yang menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2025 tidak terlepas dari RENSTRA selama 5 (Lima) tahun yaitu tahun 2021-2026. Adapaun Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Tema

Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu ***"Memantapkan Kemajuan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan kemandirian keuangan daerah serta terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat"*** guna mewujudkan prioritas pembangunan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Daerah; serta Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.2. Landasan Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

a. Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4, Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
3. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan Pajak
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
5. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data
 - b. Sub Bidang Evaluasi PAD
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT)

Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) sesuai kebutuhan. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

1.1. Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program badan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan, protokol serta pembuatan laporan badan.

1.2. Fungsi

Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan Badan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
- e. Pengelolaan urusan umum, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan.

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, yang bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
- b. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Badan;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian;
- e. Mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat;
- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. Menyusun laporan kegiatan pada sub bagiannya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

2.1 Tugas

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran yang berkaitan dengan pajak daerah;
- b. Menyusun rencana kerja bidang;
- c. Menatausahakan pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran pajak daerah.

1) Sub Bidang Pendataan Pajak

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dalam hal pemutakhiran dan pendataan seluruh pajak daerah;
- c. Menyusun rencana kegiatan pendataan potensi seluruh pajak daerah;
- d. Menyusun rencana kegiatan validasi dan pemutakhiran potensi seluruh pajak daerah;

- e. Menyelenggarakan penatausahaan hasil pendataan, validasi dan pemutakhiran seluruh pajak daerah;
- f. Melakukan pemutakhiran peta Sistem Informasi Geografis (SIG);
- g. Melakukan penertiban objek pajak daerah;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Melakukan penilaian dan penetapan seluruh potensi pajak daerah;
- c. Menyusun draft peraturan tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- d. Melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap ketetapan pajak;
- e. Menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan ketetapan dan penagihan pajak;
- f. Mengadministrasikan buku penjagaan peta wilayah/desa, peta blok dan peta zona nilai tanah;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi data penetapan dan penerimaan pajak daerah;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- i. Melakukan koordinasi dengan UPT;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan

3.1 Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.

3.2 Fungsi

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- b. Menyusun rencana kerja bidang;
- c. Menatausahakan Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pajak daerah.

1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Dipimpin oleh Kepala sub bidang Penagihan Pajak Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
- c. Mengkoordinir penyampaian, penagihan dan penyetoran pajak daerah;
- d. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
- e. Melaksanakan usulan penghapusan piutang;
- f. Melaksanakan administrasi penyitaan objek pajak daerah dan tindak lanjutnya;
- g. Melaksanakan penatausahaan penagihan pajak daerah;
- h. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan dana bantuan keuangan propinsi;
- i. Melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan draft surat perintah penyitaan terkait penagihan aktif;
- k. Membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan;

- l. Melakukan rekonsiliasi hasil penagihan pajak daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan UPT;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Menyelesaikan keberatan, pengurangan dan pengangsuran pembayaran seluruh pajak daerah;
- c. Melaksanakan penatausahaan keberatan, pengurangan dan banding yang diajukan wajib pajak;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- e. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- f. Melakukan koordinasi dengan UPT;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.1 Tugas

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas kedinasan yang menyangkut urusan Pengolahan Data, Pembinaan SKPD yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah dan Evaluasi PAD.

4.2 Fungsi

Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengolah Data dan Evaluasi PAD yang berkaitan dengan pajak daerah;
- b. Menyusun rencana kerja bidang;
- c. Menatausahakan pengolahan data dan evaluasi PAD

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan perekaman data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- c. Melakukan pemeliharaan master file, back up, recovery data, perangkat lunak dan perangkat keras serta media komputer;
- d. Memproduksi data keluaran berupa Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih bayar (SKPDKB/LB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPD Nihil, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), SK pemberian Pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/pembatalan hasil pembetulan serta data keluaran lainnya yang diperlukan;
- e. Melaksanakan pembatalan SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB/LB, SKPDKBT, SKPD Nihil, DHKP, SK pemberian pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan hasil pembetulan berdasarkan permohonan dari wajib pajak;
- f. Melakukan penatausahaan restitusi dan kompensasi pajak daerah;

- g. Menghimpun data piutang pajak daerah;
- h. Mengkoordinir penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan koreksi data;
- j. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan penyetoran pajak daerah;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah;
- l. Menyusun laporan penerimaan daerah dan laporan piutang;
- m. Melakukan koordinasi dengan UPT;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir segala penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah;
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- c. Menyusun laporan evaluasi PAD secara berkala;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap SKPD penghasil penerimaan daerah;
- e. Mengevaluasi setiap penerimaan PAD;
- f. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara Penerimaan di setiap SKPD terkait pengelolaan PAD;
- g. Menetapkan target terkait PAD;
- h. Melakukan koordinasi dengan UPT;
- i. Melakukan sosialisasi peraturan pajak daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan..

6. Sub Koordinator

Sub Koordinator melaksanakan tugas tambahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah

Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah serta :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Jangka Pendek (1 tahun)
2. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten dengan Pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sedangkan tujuan Penyusunan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Menjamin Pemanfaatan sumber daya secara terukur, efektif dan efisien.
4. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP).
5. Terciptanya sinkronisasi, sinergitas dan integritas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, susunan organisasi dan tata kerja SOTK dan kewenangan perangkat daerah, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai semester I, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancnagan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan serta strategi dan kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan serta pagu yang dianggarkan

BAB V PENUTUP

Bab ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini merupakan gambaran laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Capaian Kinerja Sasaran secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun sebelumnya untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya. Evaluasi Pelaksanaan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I (Pertama).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Semester I

Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab-nya yang telah diperoleh hasil capaian kinerjanya.

Adapun rangkuman terhadap hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dicapai dalam penetapan kinerja tahun 2024 sampai dengan semester I adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.532.080.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.975.850.151,- terdiri dari 5 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan realisasi fisik 45,45 persen dengan Predikat Kinerja Sangat Rendah dan realisasi keuangan 39,51 persen dengan Predikat Kinerja Sangat Rendah yang diarahkan untuk terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah dan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.107.135.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 107.292.656,- dengan realisasi fisik 38,05 persen dengan Predikat Sangat Rendah dan realisasi keuangan 9,69 persen dengan Predikat Kinerja Sangat Rendah yang diarahkan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat

Tabel 2.1.1
Capaian Realisasi Program Kegiatan Pada BP2RD Tahun 2024
(Semester I)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.532.080.000,-	2.975.850.151,00	39,51 %
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.107.135.000,-	107.292.656,00	9,69 %
Total Jumlah		8.639.215.000,-	3.083.142.807,00	35,69%

Secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat belum melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2024 sampai dengan Semester I, rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 dicapai dengan kategori sangat rendah. Hasil pencapaian target terhadap masing-masing indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2
Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Semester I
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp.	%	Rp.	%
TOTAL BELANJA	8.968.481.000,00	3.083.142.807,00	35,69%	5.556.072.193,00	61,95%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.735.516.000,00	2.975.850.151,00	39,51%	2.906.093.656,00	37,57%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.485.900.000,00	2.048.505.788,00	37,35%	3.437.394.212,00	62,66%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN (Insentif Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah)	5.485.000.000,00	2.048.505.788,00	37,35%	3.436.494.212,00	62,66%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000,00	227.500,00	75,83%	72.500,00	24,17%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000,00	227.500,00	75,83%	72.500,00	24,17%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.000,00	707.000,00	78,56%	193.000,00	21,44%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000,00	238.000,00	79,33	62.000,00	79,33%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	300.000,00	245.000,00	81,67	55.000,00	81,67%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000,00	224.000,00	74,67	76.000,00	74,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.636.500,00	207.959.660,00	41,90%	288.340.340,00	43,51%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	3.081.700,00	51,36%	2.918.300,00	44,90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	11.000.000,00	1.730.000,00	21,63%	6.270.000,00	57,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.176.000,00	14.703.500,00	22,97%	49.296.500,00	54,07%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.500.000,00	14.709.500,00	58,84%	10.290.500,00	14,60%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	540.000,00	18,00%	2.460.000,00	82,00%
Penyediaan Bahan Material	110.160.000,00	47.907.500,00	39,92%	72.092.500,00	65,44%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	125.287.460,00	46,40%	144.712.540,00	41,35%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.180.000,00	717.220.203,00	46,96%	809.959.797,00	52,05%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	130.000,00	6,50%	1.870.000,00	93,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	386.000.000,00	120.130.103,00	32,12%	253.869.897,00	65,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	4.370.100	87,40%	629.900,00	3,94%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.152.180.000,00	592.590.000,00	51,70%	553.590.000,00	48,05%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.100.000,00	1.230.000,00	6,15%	26.870.000,00	95,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.100.000,00	0,00	0,00%	8.100.000,00	100,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	1.230.000,00	24,60%	3.770.000,00	75,40%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.232.965.000,00	107.292.656,00	9,69%	1.098.022.344,00	89,06%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	197.200.200,00	0,00	0,00%	197.200.200,00	100,00%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	59.020.000,00	0,00	0,00%	59.020.000,00	100,00%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	46.400.000,00	0,00	0,00%	46.400.000,00	100,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00%	60.000.000,00	100,00%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	115.653.500,00	20.159.300,00	24,99%	60.494.200,00	52,31%
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	72.771.100,00	9.273.500,00	12,74%	63.497.600,00	87,26%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.200.000,00	0,00	0,00%	6.200.000,00	100,00%
Penetapan Wajib Pajak	10.200.000,00	0,00	0,00%	10.200.000,00	100,00%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	0,00	0,00%	0	100,00%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	135.945.800,00	68.593.856,00	50,46%	67.351.944,00	49,54%
Penagihan Pajak Daerah	184.511.000,00	3.620.000,00	1,96%	180.891.000,00	98,04%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11.500.000,00	249.000,00	2,17%	11.251.000,00	97,83%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.234.000,00	4.977.000,00	22,38%	17.257.000,00	77,62%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	311.329.400,00	420.000,00	0,13%	318.959.400,00	102,45%

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Bulan Juni (Semester I) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.083.142.807,- atau sebesar 35,69 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.968.481.000,- tidak termasuk Pendapatan Transfer dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024
Per 30 Juni 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	29.156.787.500,00	10.181.232.954,00	34,92%
Retribusi Daerah	7.709.140.000,00	2.973.856.582,00	38,58%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	6.844.661.601,09	175,50%
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.500.000.000,00	12.144.710.136,20	41,17%
Total Pendapatan Daerah	70.265.927.500,00	32.144.461.273,29	45,75%

Adapun realisasi penerimaan pajak asli daerah pada tahun 2024 sampai dengan semester I dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2024 Per 30 Juni 2024

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI 2024 Per 30 JUNI 2024	%
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	29.156.787.500,00	10.181.232.954,00	34,92%
Pajak Hotel	105.787.500,00	26.073.927,00	24,65%
Pajak Restoran	2.961.000.000,00	781.400.169,00	26,39%
Pajak Hiburan	70.000.000,00	11.189.325,00	15,98%
Pajak Reklame	500.000.000,00	134.640.631,00	56,93%
Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	6.864.209.419,00	45,76%
Pajak Mineral Bukan Logam lainnya	1.500.000.000,00	93.900.617,00	6,26%
Pajak Parkir	20.000.000,00	2.600.000,00	13,00%
Pajak Air Tanah	250.000.000,00	55.705.215	22,28%
Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00	173.365.950,00	21,42%
Pajak Bumi dan Bangunan	6.300.000.000,00	961.565.001,00	15,26%
Pajak BPHTB	1.650.000.000,00	1.079.712.700,00	65,44%

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan 2 (dua) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.5
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Capaian Tahun 2023	Persentase Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	77,50	71,45	92,40 %	Sangat Tinggi
	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	9,43	8,37	97,44	Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (OPD) berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat.

Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur penunjang Urusan Keuangan di bidang pendataan, penilaian dan Penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dalam bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Keberatan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja							Realisasi Capaian						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	63,87	75,88	76,00	76,50	76,75	77,00	77,50	63,87	75,88	71,15	71,45	-	-	-
	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Meningkatnya Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	8,17%	6,78%	8,87%	9,22%	9,39%	9,38%	9,43%	8,17%	6,78%	9,14	8,37	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Meskipun sudah tercapai kemajuan pada bidang pelayanan pembayaran pajak daerah, masih ada permasalahan yang dihadapi seperti bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan pemerintah daerah yang terbatas. Permasalahan pelayanan pembayaran pajak daerah ini diindikasikan oleh belum memadainya kenyamanan serta kepuasan pengguna jasa, baik dari kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, manajemen operasional dan pelayanan maupun kualitas penegakan hukum.

Hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (*weaknesses*), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (*opportunities*) yang harus direbut, atau tantangan (*threats*) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (*strengths*) yang harus dioptimalkan.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disimpulkan antara lain :

A. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

➤ **Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah :

- Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya
- Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik umum maupun pengelolaan pendapatan daerah
- Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
- Sistem Penarikan pajak cukup jelas
- Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

➤ **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, baik kelemahan yang bersifat internal maupun eksternal, adapun kelemahan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi pengelolaan pendapatan antara lain :

- Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring
- Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai.
- Banyaknya sarana dan prasarana penunjang yang sudah tidak update lagi dengan teknologi baru
- Akses Teknologi digital yang belum merata
- Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah
- Manajemen kurang baik
- lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak

B. Analisa Ligkungan Eksternal (ALE)

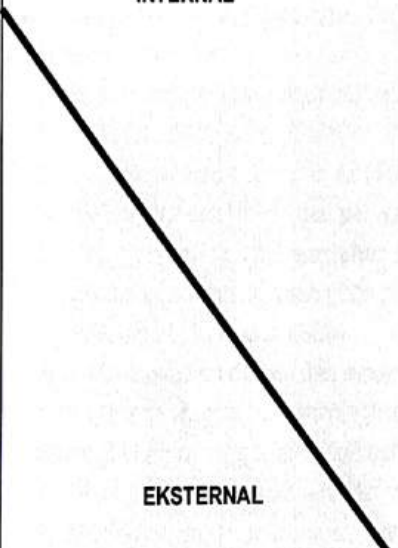
➤ **Peluang (Opportunity)**

- Adanya kesadaran membayar pajak daerah
- Masih ada potensi pajak yang belum tergali
- Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat
- Era globalisasi dan kemajuan lptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan ke wajib pajak
- Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
- Kerjasama dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan pajak daerah

➤ **Tantangan (Threath)**

- Cakupan wilayah potensi yang cukup luas
- Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;
- Adanya usaha untuk menghindari melakukan pembayaran pajak
- Tuntutan terhadap mutu pelayanan
- Situasi ekonomi dan penganggaran yang tidak stabil

Tabel 2.3.1
Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat

INTERNAL  EKSTERNAL	(S) STRENGTHS (KEKUATAN) - Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya - Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik umum maupun pengelolaan pendapatan daerah - Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat - Sistem Penarikan pajak cukup jelas - Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	(W) WEAKNESS (KELEMAHAN) - Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring - Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai. - Banyaknya sarana dan prasarana penunjang yang sudah tidak update lagi dengan teknologi baru - Akses Teknologi digital yang belum merata - Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah - Manajemen kurang baik - lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak
(O) OPPORTUNITIES (KESEMPATAN) - Adanya kesadaran membayar pajak daerah - Masih ada potensi pajak yang belum tergali - Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat - Era globalisasi dan kemajuan lptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan ke wajib pajak - Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat - Kerjasama dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan pajak daerah	STRATEGI SO - Memperbaiki perencanaan - Meningkatkan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak - Mengevaluasi kinerja dan pelayanan	STRATEGI WO - Meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak - Memperbaiki kualitas SDM - Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja - Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada

(T) TREATS (ANCAMAN)	STRATEGI ST	STRATEGI TW
• Cakupan wilayah potensi yang cukup luas • Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi; • Adanya usaha untuk menghindari melakukan pembayaran pajak • Tuntutan terhadap mutu pelayanan • Situasi ekonomi dan penganggaran yang tidak stabil	• Penegakan peraturan daerah kepada wajib pajak secara tegas • Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja bidang serta pihak swasta dan instansi vertikal untuk pengelolaan pajak daerah • Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak	• Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak/masyarakat akan pentingnya pajak daerah • Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut :

A. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (Strategi SO)

1. Memperbaiki perencanaan
2. Meningkatkan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
3. Mengevaluasi kinerja dan pelayanan

B. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (Strategi WO)

1. Meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
2. Memperbaiki kualitas SDM
3. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja
4. Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada

C. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (Strategi ST)

1. Penegakan peraturan daerah kepada wajib pajak secara tegas
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja bidang serta pihak swasta dan instansi vertikal untuk pengelolaan pajak daerah
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak

D. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (Strategi WT)

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak/masyarakat akan pentingnya pajak daerah
2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 antara lain :

1. Kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang keuangan daerah
2. Digitalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Penegakan hukum terhadap penunggakan pajak
4. Pengembangan Teknologi Informasi Penatausahaan Pendapatan Daerah

2.4. Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal (RENJA)

Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan yang telah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2026 diperlukan perubahan/ penyesuaian atas Ranwal RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat Tahun

2026. Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 berdasarkan RENSTRA OPD Tahun 2021-2026.

Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang pendapatan daerah yang telah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2026, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2025 diperlukan perubahan/penyesuaian atas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2025. Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tabel 2.4.1
Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat TA. 2026

NO.	RENSTRA 2026					RANCANGAN AWAL RENJA 2026				
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
			OUTPUT	TARGET CAPAIAN				OUTPUT	TARGET CAPAIAN	
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				10.310.000.000	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				10.713.840.450
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BP2RD KAB. BABAR	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	3,54% 2,93%	1.300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BP2RD KAB. BABAR	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	3,42% 2,84%	721.520.450
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BP2RD KAB. BABAR	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.010.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BP2RD KAB. BABAR	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.992.320.000

REVISI RENSTRA 2026						RANCANGAN AWAL RENJA 2026					
NO.	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	KET
			OUTPUT	TARGET CAPAIAN				OUTPUT	TARGET CAPAIAN		
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA			77,50	10.270.000.000	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA			77,50	10.713.840.450	
				100,00					100,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	100%	8.970.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	100%	9.992.320.000	
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	10.000.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300.000	Ranwal Induk/Perubahan, Buku Resiko, PK
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KOordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	RKA Induk
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	RKA Perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ccapaian Kinerja dan Ikhtisar Rrealisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ccapaian Kinerja dan Ikhtisar Rrealisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	300.000	Dalev Hasil, Dalev Pelaksanaan, Dalev Kebijakan, lap. Ikhtisar Realisasi KinerJa SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000	LKJ, LPPD & LKPJ
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.506.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.470.400.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BP2RD	Jumlah Orang yang menrima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	6.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BP2RD	Jumlah Orang yang menrima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	7.469.500.000	29 PNS +1 CPNS + 34 PPPK
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	300.000	LAKIP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	300.000	Laporan LRA Semesteran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BP2RD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BP2RD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300.000	Laporan Prognosis
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	300.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	300.000	Laporan Penatausahaan brg Smstr 1 & 2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	68.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	111.300.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BP2RD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	12.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BP2RD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		63.000.000	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BP2RD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BP2RD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 org	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 org	16.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 org	28.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 org	32.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	725.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	823.900.000	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yng disediakan	4 Paket	9.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yng disediakan	4 Paket	6.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Scanner
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BP2RD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BP2RD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	11.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BP2RD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	110.600.000	
Penyediaan Barang dan Penggandaan	BP2RD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BP2RD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	80.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BP2RD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	4.500.000	
Penyediaan Bahan/Material	BP2RD	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	125.500.000	Penyediaan Bahan/Material	BP2RD	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	101.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BP2RD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	490.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BP2RD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.475.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.568.880.000	
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	326.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	385.000.000	
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	20.000.000	Service + Suku Cadang Komputer/ Laptop
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.126.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BP2RD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.160.880.000	Peningkatan dr SMA ke SI & DIII ke SI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	149.240.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.540.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	BP2RD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	BP2RD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP2RD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan Perizinannya	22 Unit	126.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP2RD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan Perizinannya	12 Unit	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	7.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	15.000.000	1 unit gedung kantor, 1 unit gedung UPT Jebus & 1 unit gedung rapat
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14 Unit	15.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14 Unit	8.540.000	Pemeliharaan AC

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhi Pengadaan Barang	100%	34.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhi Pengadaan Barang	100%	0-	
	Pengadaan Mebel	BP2RD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	BP2RD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		-	Kursi Tamu/ Rapat
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP2RD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP2RD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	1 unit mobil utk operasional lapangan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	Alat Ukur / alat studio
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	Pembuatan WC di gedung rapat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	4.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	Pengadaan AC
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	Tempat Parkir
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,42%	1.300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,42%	721.520.450	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,84%	1.300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,84%	721.520.450	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	43		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	43		

			Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17 Dokumen / Laporan	454.000.000			Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17 Dokumen / Laporan	158.114.150	
			Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20 Dokumen / Laporan	392.000.000			Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20 Dokumen / Laporan	332.111.800	
			Jumlah Dokumen/Laporan Pajak Daerah, Penyelesaian Pajak Daerah dan Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen / Laporan	454.000.000			Jumlah Dokumen/Laporan Pajak Daerah, Penyelesaian Pajak Daerah dan Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen / Laporan	231.294.500	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	19.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	7.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	94.700.700	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	24.766.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Lapoaaran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	54.055.700	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Lapoaaran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	46.400.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	10.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	124.802.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	68.193.200	

	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	184.498.00	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	55.370.950	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BP2RD	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	5.080 OP	55.140.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BP2RD	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	5.080 OP	300.000	
	Penetapan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	50.560.000	Penetapan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	7.250.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	10.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	187.798.100	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	135.945.800	
	Penagihan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	246.837.000	Penagihan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	188.310.500	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	97.163.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	2.800.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	110.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BP2RD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	40.184.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	55.445.500	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BP2RD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	125.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk kegiatan/sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat yang merupakan usulan kegiatan dari masyarakat untuk Tahun Anggaran 2026 tidak ada usulan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669), maka pembagian urusan Pemerintahan menjadi jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Dalam rangka pencapaian kebijakan Nasional, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengambil kebijakan sebagai berikut :

1) Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Adapun arah yang kebijakan yang dapat diambil menyangkut peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2026 adalah ***"Memantapkan Kemajuan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan kemandirian keuangan daerah serta terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat"***

Guna mewujudkan prioritas pembangunan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Daerah; serta Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Maka dengan berbagai prioritas diatas, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sekaligus sebagai simbol kemandirian keuangan daerah, yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daaerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2026 mempunyai tujuan yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya pendapatan daerah

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan daerah - Penguatan penerapan kebijakan satu data - Optimalisasi penerapan SPBE	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	- Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Meningkatkan peran BUMD dan BUMDes	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan daerah

Tabel 3.2.2
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (%)	Target Kinerja 2026 (%)	Kondisi Akhir Renstra 2026
Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	%	77,50	77,50
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100,00	100,00
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Nilai DOFD	%	9,43	9,43
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Capaian Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	48,84	48,84

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan rencana kerjanya didukung oleh program-program dan kegiatan-kegiatan strategis. Terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang disusun untuk menunjang kerja perangkat daerah selama satu tahun kedepan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan

3.4 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selain dari itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Penerapan perencanaan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkualitas;
2. Pengendalian dan evaluasi perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah; dan
3. Meningkatkan system pelayanan terpadu dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah

Kebijakan :

Meningkatkan pemahaman SDM Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menguasai peraturan Pajak dan Retribusi Daerah;

- a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan;
- b. Memantapkan sistem terpadu dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- c. Penerapan sistem pelayanan online dan terpadu di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah; serta
- e. Mengoptimalkan pengelolaan PAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pendanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 guna mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang perkantoran serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan OPD yang bertanggungjawab dan transparan.

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Arah dan kebijakan dari Program ini adalah efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan guna pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir :

Tabel 4.1
Rincian Rencana Program dan Kegiatan BP2RD Tahun Anggaran 2026

NO.	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN 2026	PRAKIRAAN MAJU	KET.
							HASIL KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				
							TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,50	%		77,50	10.713.840.450	12.204.723.900	
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	100,00	%		100,00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah		100%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.992.320.000	10.648.840.000	
I.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	1.500.000	10.000.000	

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	300.000	2.000.000	RENSTRA Induk/ Perubahan, RENJA Induk/ Perubahan & PK
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	300.000	2.000.000	RKA Induk
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	300.000	2.000.000	RKA Perubahan
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	300.000	2.000.000	Dalev hasil, Dalev PelaksanaanD alev Kebijakan & Lap. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	300.000	2.000.000	LKJ, LPPD dan LKPJ

II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.470.400.000	7.475.500.000	
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Orang/ bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji	36/orang bulan	7.469.500.000	7.469.500.000	Rutin
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	300.000	2.000.000	LAKIP
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3	300.000	2.000.000	Laporan Semesteran
9.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	300.000	2.000.000	Laporan Prognosis
III.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	300.000	2.000.000	Rutin

10.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	300.000	1.500.000	Perencanaan, Rekonsiliasi & Pelaporan BMD
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	111.300.000	122.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	63.000.000	63.000.000	
11.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	300.000	2.000.000	
12.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	80	16.0000.000	25.000.000	Rutin
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	38 orang	32.000.000	32.000.000	

V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah		100%	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	100%	823.900.000	851.000.000	
14.	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	6.500.000	9.100.000	Rutin
15.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	20.000.000	36.000.000	Scanner
16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	11.000.000	11.000.000	Rutin
17.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya bahan logistik kantor		Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	110.000.000	110.000.000	Rutin
18.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	80.000.000	80.000.000	Rutin
19.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	4.500.000	4.500.000	Rutin
20.	Penyediaan Bahan/ Material			Tersedianya Bahan/ material		paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	101.000.000	125.500.000	Rutin

21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	490.000.000	490.000.000	Rutin
22.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	300.000	300.000	Rutin
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang	100%	-	505.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		-	350.000.000	1 unit mbl operasional
	Pengadaan Mebel			Tersedianya Mebel		Unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		-	35.000.000	kursi tamu /kursi rapat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	20.000.000	Alat Ukur /alat studio
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tersedianya Gedng Kantor atau bangunan lainnya		Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	75.000.000	Gudang Arsip
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	15.000.000	1 (satu) unit AC utk UPT Mentok

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	50.000.000	Parkir Kendaraan,
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.567.880.000	1.568.880.000	
23.	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat			Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	2.000.000	Rutin
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	385.000.000	385.000.000	Jasa telepon, listrik ISP PBB, Biaya pendampingan aplikasi vitex
25.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	20.000.000	20.000.000	Service + Suku Cadang Komputer, Laptop, printer
26.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.160.880.000	1.160.880.000	Gaji PHL

VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Presentase terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	28.100.000	80.500.000	Rutin
27.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dinayarkan pajak dan perizinannya	12	5.000.000	43.960.000	pembayaran pajak kendaraan 12 unit
28.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	15.000.000	15.000.000	1 unit gedung kantor, 1 unit gedung rapat, 1 unit UPT
29.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14	8.540.000	15.500.000	Pemeliharaan AC
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Nilai DOFD	9,43	%		9,43			
				Capaian Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	48,84	%		48,84			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,42	%		3,42	721.520.450	1.555.883.900	
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,84	%		2,84			

VIII.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17	158.114.150	454.000.000	
						Laporan/ Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20	332.111.000	647.833.900	
						Laporan/ Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Penagihan Pajak daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	6	231.294.500	454.000.000	
30.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	7.000.000	19.000.000	Strategis
31.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	24.766.000	94.700.700	Strategis

32.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Tertindakannya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	46.400.000	54.055.700	Strategis
33.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	20.000.000	-	
34.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	68.193.200	124.802.000	Termasuk operasional kendaraan Dinas. Double cabin
35.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Tertindakannya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daaerah		Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Data Pajak Daerah (Laporan PBB, BPHTB dan Laporan 9 Pajak Daerah)	12	55.370.950	184.498.000	Strategis
36.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Terpenuhiya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya		OP	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	4.970	300.000	55.140.000	Strategis
37.	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	7.250.000	50.560.000	Strategis
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	-	10.000.000	

38.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	135.945.800	187.798.100	Strategis
39.	Penagihan Pajak Daerah			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2	184.310.500	246.837.000	Strategis
40.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	2.800.000	97.163.000	Strategis
41.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	40.184.000	110.000.000	Strategis
42.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	125.000.000	311.329.400	Strategis
JUMLAH TOTAL ANGGARAN									10.713.840.450	12.204.723.900	

Secara garis besar rumusan Rincian Rencana Program dan Kegiatan BP2RD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) BP2RD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 merupakan Program/Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD dalam kerangka penunjang urusan pemerintah daerah, yaitu perumusan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, administrasi umum perangkat daerah, pemeliharaan barang milik daerah serta administrasi kepegawaian perangkat daerah.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program yang terdiri 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Program/Kegiatan rutin pada OPD dan 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk Program/Kegiatan Strategis Pembangunan.
3. Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2026 adalah sebanyak 8 Kegiatan dengan rincian 43 Sub Kegiatan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 7 kegiatan dengan 30 sub kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan 13 sub kegiatan .
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu Indikatif dalam pelaksanaan RANWAL TA. 2026 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebesar **Rp.10.713.840.450,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**. Total keseluruhan anggaran tersebut termasuk **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan penyusunan Anggaran Rencana Awal Kerja Tahun Anggaran 2026 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun Renja Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mengacu pada Nomenklatur Baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ini semuanya sesuai dengan tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dan dipetakan keberaturan baru tersebut yang dapat dijadikan pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Barat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat secara rinci keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak, kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan tolak ukur keberhasilan Perangkat Daerah guna **"Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah"**.

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat

Mentok, 6 Desember 2024
KEPALA

MIWANI, S.E
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 198008242006042026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TA. 2026
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					UNIT PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							RENSTRA		RENJA		PRAKIRAAN MAJU		
							2026		2026				
							Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah					Nilai SAKIP OPD	%	77,50		77,50			BP2RD	
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100		100				
JUMLAH PAGU ANGGARAN								10.270.000.000		10.713.840.450	12.204.723.900		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	8.970.000.000	100%	9.992.320.000	10.648.840.000		
		5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	100%	10.000.000	100%	1.500.000	10.000.000		
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	2.000.000	4	300.000	2.000.000	BP2RD	RENJA Induk/ Perubahan, Buku Resiko & PK
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2.000.000	1	300.000	2.000.000	BP2RD	RKA Induk
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2.000.000	1	300.000	2.000.000	BP2RD	RKA Perubahan

		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.000.000	4	300.000	2.000.000	BP2RD	Dalel hasil, Dalel Pelaksanaan, Dalel Kebijakan & Lap. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2.000.000	3	300.000	2.000.000	BP2RD	LKJ, LPPD dan LKPJ
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	6.506.000.000	100%	7.470.400.000	7.475.500.000		
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	36	6.500.000.000	72	7.469.500.000	7.469.500.000	BP2RD	29 PNS + 1 PPPK + rencana 2 org PPPK Baru + 1 CPNS +39 Paruh waktu
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.000.000	2	300.000	2.000.000	BP2RD	LAKIP
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	2.000.000	2	300.000	2.000.000	BP2RD	Laporan LRA Semesteran
		5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2.000.000	2	300.000	2.000.000	BP2RD	Laporan Prognosis
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	2.000.000	100%	300.000	2.000.000		
		5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	2.000.000	2	300.000	2.000.000	BP2RD	Laporan Semester 1 dan 2

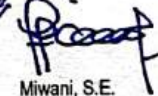
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	%	100%	68.000.000	100%	111.300.000	122.000.000		
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	Paket	25	12.500.000	1	63.000.000	63.000.000	BP2RD	Penambahan utk 29 PNS + 1 PPPK + rencana 2 org PPPK Baru + 1 CPNS +39 Paruh waktu
		5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrai Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	dokumen	12	2.000.000	12	300.000	2.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	80	25.000.000	64	18.000.000	25.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	38	28.500.000	64	32.000.000	32.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	725.100.000	100%	823.900.000	851.000.000		
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.100.000	4	6.500.000	9.100.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	20.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	11.000.000	11.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	12	110.600.000	110.600.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	80.000.000	80.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	3.500.000	12	4.500.000	4.500.000	BP2RD	

		5.02.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Behen/ material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	125.500.000	12	101.000.000	125.500.000	BP2RD	
		5.02.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	450.000.000	12	490.000.000	490.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.08.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	300.000	300.000	BP2RD	
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang	100%	100%	34.500.000	100%	0	545.000.000		
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				0	350.000.000	BP2RD	1 (satu) Unit Mobil Utk Operasional
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit				0	35.000.000	BP2RD	Kursi Tamu/Rapat
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10.000.000		0	20.000.000	BP2RD	Alat Ukur/Alat Studio
		5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		10.000.000		0	75.000.000	BP2RD	Pembuatan WC di ruang rapat
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	4.500.000		0	15.000.000	BP2RD	Pengadaan AC
		5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	10.000.000		0	50.000.000	BP2RD	Tempat Parkir
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	1.475.160.000	12	1.556.380.000	1.568.880.000		
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	1	2.000.000	3.000.000	BP2RD	
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	326.000.000	12	385.000.000	385.000.000	BP2RD	Jasa Telepon, Listrik, ISP PBB dan biaya pendampingan aplikasi VITEX

		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	20.000.000	2	8.500.000	20.000.000	BP2RD	Service + Suku Cadang Komputer, Laptop, printer
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.126.180.000	12	1.160.880.000,00	1.160.880.000,00	BP2RD	39 PHL
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	149.240.000	12	28.540.000	74.460.000		
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	22	126.240.000	22	5.000.000	43.960.000	BP2RD	12 unit motor (karena 7 unit mtr + 1 mbl double cabin akan dilelang)
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	7.500.000	3	15.000.000	15.000.000	BP2RD	1 unit gedung kantor, 1 unit gedung UPT Jebus & 1 unit gedung rapat
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	14	15.500.000	14	8.540.000	15.500.000	BP2RD	Pemeliharaan AC
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah				Nilai DOFD	%	9,43		9,43				
					Capaian Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	48,84		48,84				
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	3,42%	1.300.000.000	3,42%	721.520.450	1.555.883.900		
				Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	2,84%		2,84%				
		5.02.04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Laporan	17	454.000.000	17	158.114.150	454.000.000		

				Terlaksananya Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	Laporan	20	392.000.000	20	332.111.800	647.883.900		
				Terlaksananya Penyelesaian Pajak Daerah dan Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	Laporan	6	454.000.000	6	231.294.500	454.000.000		
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	19.000.000	1	7.000.000	19.000.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	3	94.700.700	3	24.766.000	94.700.700	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	54.055.700	2	46.400.000	54.055.700	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	10.000.000	2	20.000.000	10.000.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	124.802.000	2	68.193.200	124.802.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	184.498.000	12	55.370.950	184.498.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Obyek Pajak	5.080	55.140.000	5.080	300.000	55.140.000	BP2RD	

		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	2	50.560.000	2	7.250.000	50.560.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	10.000.000	12	0	10.000.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	11	187.798.100	11	135.945.800	187.798.100	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	2	246.837.000	2	188.310.500	246.837.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	2	97.163.000	2	2.800.000	97.163.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	2	110.000.000	2	40.184.000	110.000.000	BP2RD	
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	55.445.500	4	125.000.000	311.329.400	BP2RD	

Kepala,


Miwani, S.E.
NIP. 19800824 200604 2 026



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Mentok
Telepon/Faximile (0716) 7323033, Email : bpprd.bangkabarat@gmail.com, Website :
bp2rd.bangkabaratkab.go.id - Kode Pos 33351

Mentok, 06 Desember 2024

Yth. BAPPERIDA Kabupaten Bangka Barat
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor :700.1.2/ SIA /BP2RD/2024

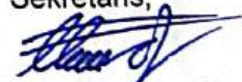
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
I.	Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 BP2RD Kabupaten Bangka Barat	1 (Satu) Buku	Disampaikan dengan hormat, kiranya dapat ditindaklanjuti Terima kasih.

Diterima Tanggal 06 Des 2024..

Yang Menerima


.....a1.f.....

Pengirim
an. Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah
Sekretaris,



SANUDIN, S.H
PEMBINA TK. I/IVb
NIP 197909162005011009